



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 78-4 TAHUN 2019**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
 - b. bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); *al*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB II KOMPONEN ASB

Pasal 4

- (1) Komponen ASB meliputi:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (5) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Besarnya nilai Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (7) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (8) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
- (9) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (10) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III JENIS ASB

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan;
 - b. ASB 002 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan;
 - c. ASB 003 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai di Berbagai Daerah Dalam Provinsi;
 - d. ASB 004 Magang di Dalam Daerah;
 - e. ASB 005 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT Tanpa fasilitas Menginap;
 - f. ASB 006 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT di Hotel Tanpa Fasilitas Menginap;
 - g. ASB 007 Pelatihan Pegawai Dengan Peserta dari Luar Pegawai Pemerintah Provinsi NTT;
 - h. ASB 008 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai di Berbagai Daerah Dalam Provinsi;
 - i. ASB 009 Pelatihan Pegawai Dengan Fasilitas Menginap;
 - j. ASB 010 Diklat Pegawai; 

- k. ASB 011 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Secara Langsung;
- l. ASB 012 Sosialisasi/Diseminasi di Berbagai Daerah Dalam Provinsi;
- m. ASB 013 Sosialisasi/Diseminasi di Hotel Dengan Fasilitas Menginap Dengan Peserta Dari Eksternal Pegawai Pemprov NTT;
- n. ASB 014 Penyuluhan di Berbagai Daerah Dalam Provinsi;
- o. ASB 015 Seminar/ *Workshop*/Lokakarya/Sarasehan di Ibu kota Provinsi;
- p. ASB 016 Pendampingan/Advokasi Meja;
- q. ASB 017 Forum Masyarakat;
- r. ASB 018 Dialog/Konsultasi Publik;
- s. ASB 019 Administrasi Dialog/*Talkshow* Melalui Media Elektronik;
- t. ASB 020 Rapat Koordinasi;
- u. ASB 021 Rapat Koordinasi di Hotel;
- v. ASB 022 Evaluasi Program/Kegiatan;
- w. ASB 023 Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan;
- x. ASB 024 Monitoring dan Evaluasi;
- y. ASB 025 Lomba/Kompetisi Perorangan;
- z. ASB 026 Lomba/Penilaian untuk Kategori Kelompok/Organisasi/Lembaga;
- aa. ASB 027 Pemilihan Perorangan;
- bb. ASB 028 Penyelenggaraan Pameran;
- cc. ASB 029 Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran Luar Daerah; dan
- dd. ASB 030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 78-a

ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan ketrampilan kepada masyarakat umum di lingkungan NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 638.993,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp638.993,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,56%	13,31%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,37%	36,75%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,41%	80,26%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,15%	2,34%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,67%	15,15%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,53%	2,20%
7	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Feralatan Kantor	0,23%	2,20%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	22,69%	60,15%
9	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,24%	2,77%
10	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1,37%	7,17%
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,78%	54,64%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	20	250

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp957.110,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 957.110,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0,35%	2,84%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,67%	2,55%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,70%	55,33%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,05%	67,51%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,95%	3,02%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,65%	14,52%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,42%	1,69%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	12,78%	32,49%
9	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,50%	4,97%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,93%	34,76%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	50	1.200

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-003

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 661.645,00 per peserta, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp661.645,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,45%	1,96%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,19%	50,62%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,31%	60,03%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,76%	24,05%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,11%	9,85%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,93%	3,79%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,00%	22,79%
8	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1,18%	14,80%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,07%	52,61%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi	60	1.050

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Magang di dalam daerah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pembekalan dengan melalui proses belajar dan pelatihan yang diberikan sebelum masuk ke tempat kerja yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp176.427,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp176.427,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,14%	8,72%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,56%	37,27%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,14%	54,80%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,57%	3,41%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,69%	5,85%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	26,31%	41,20%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,59%	36,25%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	336	2.800

4

PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL PEMPROV NTT TANPA FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT di lingkungan kantor Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp270.876,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp270.876,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,71%	16,83%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,95%	11,99%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,12%	75,74%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,59%	8,47%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,80%	27,44%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,68%	51,23%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,16%	42,32%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	50	1.050

4

Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT dengan tempat pelaksanaan di hotel. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp487.453,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp487.453,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,87%	1,28%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,06%	34,61%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,02%	3,65%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	47,81%	62,28%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,24%	34,98%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	140	300

4

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN PESERTA DARI LUAR PEGAWAI PEMPROV NTT

Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang peserta dari luar internal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp681.373,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp681.373,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,67%	12,32%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,51%	3,76%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57,00%	86,19%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,17%	5,51%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,89%	9,09%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,24%	1,68%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	20,66%	40,78%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,87%	52,01%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	35	560

4

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada pegawai di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp939.169,00 per peserta, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp939.169,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,59%	4,09%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,23%	3,42%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,02%	55,03%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,75%	1,86%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,83%	5,00%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,94%	3,75%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	13,50%	22,95%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,14%	54,84%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi	100	814

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp1.590.644,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.590.644,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,06%	2,24%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,58%	1,92%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,54%	69,29%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,07%	1,69%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,80%	3,14%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,40%	1,50%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	9,15%	15,94%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,40%	48,91%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	40	140

Deskripsi:
Diklat pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam rangka meningkatkan jenjang karir tertentu. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp875.048,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp875.048,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,16%	3,13%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64,22%	69,10%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	3,55%	6,03%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,48%	7,15%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,87%	2,84%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	12,39%	20,41%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,33%	30,32%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	120	210

4

SOSIALISASI/DISEMINASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp450.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp450.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,54%	22,88%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,62%	9,57%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,95%	69,65%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	6,06%	33,84%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,25%	8,24%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,57%	21,99%
7	5.2.2.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,94%	9,06%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	20,29%	50,91%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,78%	85,27%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	45	240

SOSIALISASI/DISEMINASI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di berbagai daerah di Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp791.580,00 per peserta, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp791.580,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,99%	10,35%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,34%	8,17%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,29%	69,50%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,94%	4,28%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,35%	6,43%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,18%	1,80%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,37%	21,30%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,54%	71,82%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi	100	400

4

SOSIALISASI/DISEMINASI DI HOTEL DENGAN FASILITAS MENGINAP DENGAN PESERTA DARI EKSTERNAL PEGAWAI PEMPROV NTT

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel dengan fasilitas menginap dan peserta berasal dari eksternal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp1.636.010,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.636.010,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,32%	0,58%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85,32%	99,42%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,02%	0,04%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,34%	28,69%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi	126	198

4

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk **memberikan petunjuk teknis dan spesifik** kepada suatu kelompok yang maksimal terdiri dari 30 peserta mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp776.250,00 per peserta, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp776.250,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,68%	2,68%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,33%	36,58%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,15%	2,15%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,52%	4,55%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,51%	18,67%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,81%	79,82%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi	90	120

SEMINAR/WORKSHOP/LOKAKARYA/SARASEHAN DI IBUKOTA PROVINSI

Deskripsi:

Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp672.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp672.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,96%	18,10%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,81%	84,80%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	3,66%	13,38%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,36%	17,58%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,77%	7,33%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	19,59%	47,44%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,85%	62,13%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	30	392

4

Deskripsi:
Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri. Kegiatan ini diselenggarakan oleh OPD.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp679.778,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp679.778,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,99%	3,96%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,86%	21,78%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,09%	67,16%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,32%	5,31%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,89%	9,80%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,19%	1,51%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	17,24%	41,71%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,42%	81,53%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	40	320

Keterangan:
Jika kegiatan ini merupakan kegiatan lintas OPD maka dapat ditambahkan belanja Honorarium PNS.

Deskripsi:

Forum masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran terhadap suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 516.311,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp516.311,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,34%	10,05%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,65%	32,47%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,19%	13,95%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,45%	9,66%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,26%	1,03%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	26,52%	35,42%
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1,29%	5,17%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,30%	50,94%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	90	320

Deskripsi:
Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjangkaran opini dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan an yang bersifat spesifik.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp880.392,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp880.392,00 x jumlah peserta x umlah hari/frekuensi)

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,89%	10,05%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,53%	81,02%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	3,24%	13,95%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,89%	9,66%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,36%	1,78%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	19,88%	35,42%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,21%	53,42%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	35	150

4

ADMINISTRASI DIALOG/TALKSHOW MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Deskripsi:

Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjangkaran opini dan berkomunikasi secara melalui media elektronik (baik TV maupun radio) terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai sewa studio/nilai jasa publikasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

5,3503 x sewa studio/nilai jasa publikasi untuk Rp0,00	sampai dengan Rp5.000.000
3,7286 x sewa studio/nilai jasa publikasi untuk Rp5.000.001	sampai dengan Rp10.000.000
3,0185 x sewa studio/nilai jasa publikasi untuk Rp10.000.001	sampai dengan Rp15.000.000
2,5984 x sewa studio/nilai jasa publikasi untuk Rp15.000.001	sampai dengan Rp20.000.000
2,3132 x sewa studio/nilai jasa publikasi untuk Rp20.000.001	sampai dengan Rp25.000.000
2,1036 x sewa studio/nilai jasa publikasi diatas Rp25.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Dialog/Talkshow Melalui Media Elektronik:

No.	Nilai Sewa Studi/Nilai Jasa Publikasi (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	5.000.000	Y = 5.3503 X
2	5.000.000	< X <	10.000.000	Y = 3,7286 X
3	10.000.000	< X <	15.000.000	Y = 3,0185 X
4	15.000.000	< X <	20.000.000	Y = 2,5984 X
5	20.000.000	< X <	25.000.000	Y = 2.3132 X
6		<X	25.000.000	Y = 2,1036 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,63%	2,10%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,18%	89,29%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	5,43%	20,98%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,25%	10,71%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,51%	60,84%
			100,00%	

Deskripsi:

Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp609.223,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp609.223,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,37%	11,91%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,05%	68,32%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,28%	11,86%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,81%	10,86%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,22%	2,17%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	23,85%	88,09%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,42%	71,41%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	20	440

Deskripsi:
Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk saling memberikan informasi dan **bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan**, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan di hotel.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp917.340,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp917.340,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,54%	6,84%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,86%	99,25%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,59%	7,47%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,69%	6,52%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,55%	2,45%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	20,74%	52,67%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,03%	66,18%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	30	100

4

Deskripsi:
Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan**. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah dalam provinsi.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta evaluasi, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp597.729,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp597.729,00 x jumlah peserta evaluasi x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,45%	3,90%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,96%	62,09%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,56%	3,48%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,74%	7,17%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	32,61%	59,09%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,68%	89,09%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	70	450

4

MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Monitoring atau pemantauan atau pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **meninjau atau mengawasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian**. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat **program, kegiatan atau kejadian masih berlangsung**. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam provinsi.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah lokasi (kabupaten/kota), jumlah hari pengawasan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp1.855.350,00 per lokasi, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.855.350,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,39%	2,14%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,94%	18,85%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	0,55%	2,03%
4	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,27%	36,32%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,17%	8,29%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	0,73%	8,29%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91,95%	100,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi	2	66

7

Deskripsi:
Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **meninjau dan mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian**. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi berupa telaah serta rekomendasi perbaikan **dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan**.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah lokasi (kabupaten/kota), jumlah hari pengawasan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp1.939.269,00 per lokasi, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.939.269,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,36%	10,86%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,51%	54,70%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,47%	7,71%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,19%	32,82%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,47%	100,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi	8	198

Deskripsi:

Lomba/Kompetisi perorangan merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum perorangan yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh OPD di dalam daerah dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi hasil kegiatan tersebut

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp353.133,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp353.133,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah

Tabel 25. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,67%	5,76%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,27%	47,61%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,47%	62,94%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,90%	9,01%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,86%	9,48%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,26%	9,82%
7	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,44%	23,26%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	25,95%	51,97%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,18%	32,51%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	50	500

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

4

LOMBA/PENILAIAN UNTUK KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA

Deskripsi:

Lomba/penilaian kelompok/organisasi/lembaga merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan/penilaian dengan kriteria umum kelompok/organisasi/lembaga yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan turun langsung ke tempat objek lomba/penilaian tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kelompok lomba/penilaian

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp5.579.853 per jumlah kelompok lomba/penilaian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp5.579.853,00 x jumlah kelompok lomba/penilaian) + Belanja Hadiah

Tabel 26. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,87%	1,44%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,22%	20,86%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,82%	3,74%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,49%	1,96%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2,11%	2,96%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,49%	94,48%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah kelompok	8	88

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

4

Deskripsi:
Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk **menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan** yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp1.132.733,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.132.733,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah

Tabel 27. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3,93%	27,51%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,69%	2,15%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,99%	16,25%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,95%	62,62%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,47%	3,42%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,26%	5,59%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,16%	1,12%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,76%	13,97%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	16,58%	66,65%
10	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4,10%	10,26%
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,11%	37,97%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	75	100

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

*

Deskripsi:
Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pameran dengan maksud untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Lokasi kegiatan ini hanya dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi NTT.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah stand, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp2.222.691,00 per stand, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp2.222.691,00 x jumlah stand x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 28. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0,77%	6,95%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1,15%	4,51%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,72%	4,95%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,09%	37,44%
5	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,47%	75,46%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	10,35%	23,68%
7	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,01%	29,03%
8	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,69%	12,86%
9	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,86%	42,59%
10	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	9,54%	26,92%
11	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2,47%	14,64%
12	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,87%	58,41%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	570	570

4

ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam negeri.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Sewa Stand (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

2,3054 x sewa stand Rp.0,00 sampai dengan Rp10.000.000,00
1,9802 x sewa stand Rp.10.000.001,00 sampai dengan Rp20.000.000,00
1,6550 x sewa stand Rp.20.000.001,00 sampai dengan Rp50.000.000,00
1,3298 x sewa stand di atas Rp.50.000.001,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 10.000.000	Y = 2,3054 X + Perjalanan Dinas
2	10.000.000 < X ≤ 20.000.000	Y = 1,9802 X + Perjalanan Dinas
3	20.000.000 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,6550 X + Perjalanan Dinas
4	50.000.000 < X	Y = 1,3298 X + Perjalanan Dinas

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai sewa stand tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 29.

Tabel 29. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,53%	17,09%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,73%	13,76%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,66%	98,46%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,32%	7,55%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	8,76%	40,81%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Nilai Sewa Stand	3.000.000	40.000.000

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas dan belanja sewa sarana mobilitas. Dengan demikian, jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas dan belanja sewa sarana mobilitas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah seluruh aktivitas SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp282.221,00 per aktivitas OPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp282.221,00 x jumlah aktivitas OPD)

Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.23	Belanja Uang Lembur	30,79%	100,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,99%	100,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	29,77%	100,00%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	18,45%	68,29%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Kegiatan	18	107

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR